

DAFTAR PUSTAKA

A. Web Artikel

“Daftar Contoh Bank Pembangunan Daerah, Cek di Daerahmu!” IDN Times.
<https://www.idntimes.com/business/economy/daftar-contoh-bank-pembangunan-daerah-cek-di-daerahmu-00-gshdq-1lyyl5>.

“Jenis-Jenis Bank yang Ada di Indonesia Beserta Contohnya.” Tempo.co.
<https://www.tempo.co/ekonomi/jenis-jenis-bank-yang-ada-di-indonesia-beserta-contohnya-133733>.

“Lembaga Perbankan.” Otoritas Jasa Keuangann.
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>.

“Lokasi Bank Nagari.” Situs resmi Bank Nagari.
<https://banknagari.co.id/lokasi?page=iUREE%2FSGh92qayN32vA1Lw%3D%3D>.

“Sejarah Singkat Bank Nagari.” 123dok. <https://text-id.123dok.com/document/dy4xv650z-sejarah-singkat-bank-nagari.html>.

Bank Nagari. "Sejarah Bank Nagari/Profil".
<https://www.banknagari.co.id/profile>.

Bank Nagari. "Sejarah Bank Nagari/Profil".
<https://www.banknagari.co.id/profile>

CNBC Indonesia (Susi Setiawati). (2024). "Sejarah, Peran & Jumlah BPD di RI". <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240610101445-128-545179/sejarah-peran-jumlah-bpd-di-ri>.

Detikedu (Ilham Fikriansyah). (2025). "Daftar 38 Provinsi di Indonesia".
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7777459/daftar-38-provinsi-di-indonesia>.

Tempo.co. "Jenis-Jenis Bank yang Ada di Indonesia Beserta Contohnya".
<https://www.tempo.co/ekonomi/jenis-jenis-bank-yang-ada-di-indonesia-beserta-contohnya-133733>.

"Corporate Social Responsibility (CSR)" Bank Nagari.
<https://banknagari.co.id/csr>.

Gana, Buana. 2025. "Apa Itu Bank Pembangunan Daerah? Sejarah, Peran, Jumlah, dan Perbedaannya." Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/803524/apa-itu-bank-pembangunan-daerah-sejarah-peran-jumlah-dan-perbedaannya>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Lembaga Perbankan". <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisa-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>.

Fikriansyah, Ilham. 2025. "Daftar 38 Provinsi di Indonesia Lengkap dengan Ibu Kota Provinsi." Detik.com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7777459/daftar-38-provinsi-di-indonesia-lengkap-dengan-ibu-kota-provinsi>.

B. Arsip Undang-Undang

BPK RI. "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

BPK RI. "Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50698/uu-no-13-tahun-1962>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50698/uu-no-13-tahun-1962>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Buku

Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. "Bank & Lembaga Keuangan". Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media. 2018

Abdullah, Thamrin, dan Sintha Wahjusaputri. Bab 2: Bank & Lembaga Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Abdullah, Thamrin, dan Sintha Wahjusaputri. Bank dan Lembaga Keuangann. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021.

Andriani, Ayu Yuli dan Masrul. "Pengantar Perbankan". Padang : LPPM Universitas Ekasakti. 2023.

Andriani, Ayu Yuli, dan Masrul. Pengantar Perbankan. Padang: LPPM Universitas Ekasakti, 2023.

Yulianto, Eko, Dkk. "Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peranan Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatra Barat". 2018, Bank Indonesia Institute Jl. Mh. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Indonesia.

Wijaya, Gunawan, "Status Hukum Bank Pembangunan Daerah". 2016. Volume 2, Nomor 3.

D. Jurnal Ilmiah

Aryasahab, Dhoni Frizky. "Jurnal Sejarah PRRI/Permesta : Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah Secara Menyeluruh Di Indonesia". Jurnal Sejarah Vol. 8, No. 1.

Nina Herlina. "Metode Sejarah. Edisi Revisi". (Bandung: Satya Historika, 2020).

Permadi, Agung & Elistania. (2023). "Analisis Konstruktivis Institusionalisme Pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris". *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 9, No. 2.

Pratama, Layo Rizky. (2024). "Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". *Jurnal Dialog*, Vol. 1, No. 1.

Pratama, Layo Rizky. "Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." 2024. *Jurnal Dialog* 1, no. 1

Widjaja, Gunawan. (2016). "Status Hukum Bank Pembangunan Daerah". Volume 2, Nomor 3.

Winarti & Haryono Rinardi. (2020). "Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993". *Historiografi*, Vol. 1, No. 1.

Zunairoh, Zunairoh, DKK. "Regional Development Bank Competition: Evidence from Indonesia." *Jurnal Keuangann dan Perbankan* 27 (2023)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Untuk Pembangunan Bank Pembangunan Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1962
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata diseluruh Indonesia perlu adanya pengalihan modal dan potensi didaerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sebaiknya dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembelanjaannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
 - c. bahwa karena itu perlu mempertinggi daya-usaha didaerah untuk membangun antaranya dengan jalan memberikan kemungkinan mendirikan bank-bank didaerah-daerah yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan potensi didaerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta nasional progresip untuk mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
 - d. bahwa berhubung dengan itu dan untuk mencapai keseragaman perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai fungsi, lapangan kerja, cara mengurus dan cara menguasai serta bentuk hukum dari bank-bank dimaksud dalam rangka ekonomi terpadu;

Lampiran 2. Lokasi Kantor Pusat Pertama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Jl. Batang Arau No. 54



Lampiran 3. Lokasi Kantor Pusat Bank Nagari Setelah Pindah dari Jl. Batang Arau No. 54 Tahun 1983



Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang Mengatur Tentang Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lampiran 5. Kegiatan Tanggung Jawab Social Perusahaan Bank Nagari Sebagai Tindak Lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

1. Seleksi Audit - 2. Kegiatan Sosial Panti Asuhan - 3. Kegiatan Golf - 4. Jalan Santai



Laporan Tahunan-Annual Report



TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip

Pewawancara : Gifall Atharizq Kenedy
 Narasumber : F, staff Perencanaan Strategis Bank Nagari
 Tanggal Wawancara : 10 November 2025
 Lokasi Wawancara : Kantor Pusat Bank Nagari, Jl, Pagambiran
 Kota Padang

no	pertanyaan	Jawaban
1	Apa faktor utama yang mendorong pemerintah daerah Sumatera Barat mendirikan Bank Pembangunan Daerah?	Faktor utama yang mendorong pemerintah daerah Sumatera Barat mendirikan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) pada tahun 1962 dapat dirangkum sebagai berikut: a. Kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah • Pada awal 1960-an, pemerintah daerah membutuhkan lembaga keuangan yang mampu: • Menghimpun dana masyarakat lokal • Menyalurkannya kembali untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Sumatera Barat • Bank-bank nasional waktu itu belum mampu menjangkau kebutuhan spesifik pembangunan daerah. b. Mendorong pertumbuhan ekonomi regional • Sumatera Barat memerlukan institusi perbankan yang fokus pada: • Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah (perdagangan, pertanian, UMKM) • Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lokal c. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif • Pemerintah daerah ingin memiliki bank yang: • Dapat mengelola kas daerah secara lebih efisien • Memberikan layanan keuangan yang dekat dan responsif terhadap kebutuhan pemerintahan daerah
2	Apa alasan historis di balik pemilihan kata	• Dengan nama “Bank Nagari”, bank lebih mudah diterima dan diidentifikasi oleh masyarakat

	“Nagari” sebagai nama bank?	Sumatera Barat sebagai milik daerah («bank kebanggaan ranah Minang»). • Nama ini membantu dalam strategi pemasaran dan identitas merek (branding), karena “Nagari” lebih khas dibanding sekadar “BPD Sumbar”. • Identitas lokal ini juga bisa memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah lokal, karena nama bank terhubung dengan nilai adat dan sejarah lokal.
3	Bagaimana peran pemerintah daerah dan DPRD dalam keputusan penggantian nama tersebut?	Pemerintah daerah dan DPRD memegang peran sentral dalam proses penggantian nama tersebut. Melalui pembahasan bersama keduanya menyusun serta menetapkan dan mengesahkan penggunaan nama panggilan “Bank Nagari.” Pemerintah daerah mendorong perubahan ini sebagai strategi memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kedekatan bank dengan masyarakat, sementara DPRD memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki dasar hukum dan sejalan dengan kepentingan publik. Kolaborasi kedua lembaga inilah yang menjadikan penggantian nama tersebut sah, terarah, dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat.
4	Bagaimana masyarakat Sumatera Barat merespons pergantian nama bank menjadi Bank Nagari?	Baik, dan respon positif
5	Menurut Bapak/Ibu, apakah penamaan “Bank Nagari” dimaksudkan untuk menegaskan identitas lokal Minangkabau?	Ya
6	Seberapa besar pengaruh nilai-nilai budaya Minangkabau dalam membentuk citra Bank Nagari dari masa ke masa?	Budaya Minangkabau memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra Bank Nagari. Nama “Nagari” mencerminkan kedekatan bank dengan identitas adat Minang yang menjunjung musyawarah, kebersamaan, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut menjadikan Bank Nagari dipandang sebagai “bank urang awak” yang dipercaya masyarakat. Seiring modernisasi, bank tetap mempertahankan identitas budaya ini dalam layanan, komunikasi, dan kedekatan dengan masyarakat, sehingga citranya kuat sebagai bank

		modern yang berakar pada nilai-nilai Minangkabau.
7	Apakah Bank Nagari pernah mengalami perubahan arah kebijakan setelah pergantian nama tersebut?	Tidak
8	Bagaimana peran media lokal dalam membentuk opini publik tentang Bank Nagari di masa awal berdirinya?	Pada masa awal berdirinya, media lokal berperan penting dalam membentuk opini publik tentang Bank Nagari. Surat kabar dan publikasi daerah menjadi sarana utama untuk mengenalkan tujuan pendirian bank, manfaatnya bagi pembangunan ekonomi Sumatera Barat, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan baru milik daerah tersebut. Melalui pemberitaan mengenai program pembangunan, dukungan pemerintah, dan kisah keberhasilan nasabah, media lokal membantu membangun citra Bank Nagari sebagai institusi yang lahir dari semangat kemandirian daerah. Pemberitaan yang konsisten dan bernuansa positif dari media lokal mendorong masyarakat mengenal, menerima, dan menjadikan Bank Nagari sebagai bagian dari identitas ekonomi dan kebanggaan daerah Minangkabau.
9	Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, apa yang membuat Bank Nagari tetap relevan hingga sekarang?	Bank Nagari tetap relevan hingga saat ini karena mampu menjaga keseimbangan antara identitas lokal dan kebutuhan modern masyarakat. Sejak awal berdirinya, bank ini berperan sebagai motor pembangunan daerah, namun terus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi nasional melalui modernisasi layanan, digitalisasi, serta perluasan produk bagi UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Kedekatannya dengan nilai budaya Minangkabau serta kepercayaan masyarakat membuat Bank Nagari memiliki posisi kuat sebagai “bank daerah” yang tidak hanya melekat secara emosional, tetapi juga fungsional. Kombinasi antara akar budaya, inovasi berkelanjutan, dan peran strategis sebagai pengelola keuangan daerah menjadikan Bank Nagari tetap penting dan dipercaya hingga kini.

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip

Pewawancara : Gifall Atharizq Kenedy
 Narasumber : NL (Nasabah Bank Nagari sejak 1984)
 Tanggal Wawancara : 9 Juli 2026
 Lokasi Wawancara : Google Form

PERTANYAAN	JAWABAN
Sejak tahun berapakah Bapak/Ibu resmi menjadi nasabah di bank ini? Apakah sejak bank ini masih menggunakan nama BPD Sumbar (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)?	1984
Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih menjadi nasabah BPD Sumbar pada masa itu sebelum adanya perubahan nama menjadi Bank Nagari?	karena semua urusan gampang
Bagaimana Bapak/Ibu melihat citra atau image BPD Sumbar di mata masyarakat umum sebelum tahun 1996? Apakah terkesan kaku, sangat birokratis, atau justru sudah merakyat?	sudah merakyat
Dari segi jangkauan, apakah sebelum tahun 1996 BPD Sumbar sudah dirasa dekat dan mudah diakses oleh masyarakat yang berada di daerah pelosok/kenagarian, atau hanya berpusat di kota-kota besar saja?	mudah diakses
Jenis produk atau layanan apa dari BPD Sumbar yang paling sering Bapak/Ibu gunakan sebelum tahun 1996, dan bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu saat itu?	kredit, puasa
Apakah pihak bank (BPD Sumbar kala itu) melakukan sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami oleh Bapak/Ibu mengenai alasan dan tujuan dari perubahan nama tersebut?	ya
Bagaimana reaksi atau kesan pertama Bapak/Ibu ketika mendengar kabar pada tahun 1996 bahwa BPD Sumbar akan berganti nama menjadi Bank Nagari?	tidak masalah karena hanya berubah nama
Setelah berubah nama panggilan menjadi Bank Nagari, perubahan signifikan apa yang paling	lebih akrab dengan petugasnya dan pelayanannya juga begitu

pertama kali Bapak/Ibu rasakan dari segi pelayanan di kantor cabang?	meningkat dari sebelumnya
Apakah pergantian nama menjadi Bank Nagari membuat Bapak/Ibu melihat bank ini menjadi lebih modern dan profesional dibandingkan saat masih bernama BPD Sumbar?	betul
Dari segi kepercayaan, apakah pergantian nama tersebut meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu untuk menyimpan modal/uang dalam jumlah yang lebih besar di Bank Nagari?	tidak
Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah keputusan mengubah nama dari BPD Sumbar menjadi Bank Nagari pada tahun 1996 merupakan langkah yang sukses dan tepat sasaran jika dilihat dari perkembangannya saat ini?	iyaa
Secara keseluruhan, apa perbedaan terbesar yang paling membekas di ingatan Bapak/Ibu antara bertransaksi di BPD Sumbar (Era Pra-1996) dengan bertransaksi di Bank Nagari (Era Pasca-1996)?	sangat familiar di bank nagari

